



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
BENGKALIS



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

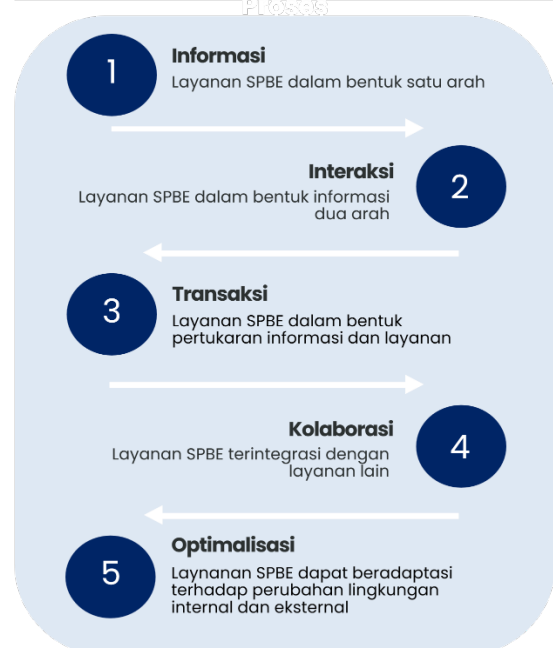
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



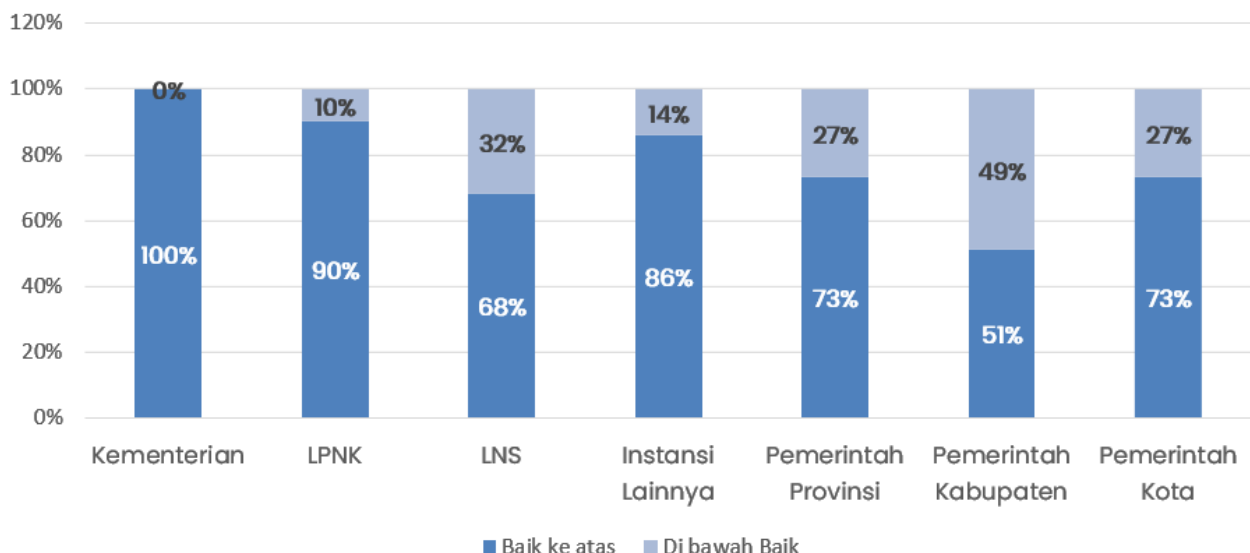
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

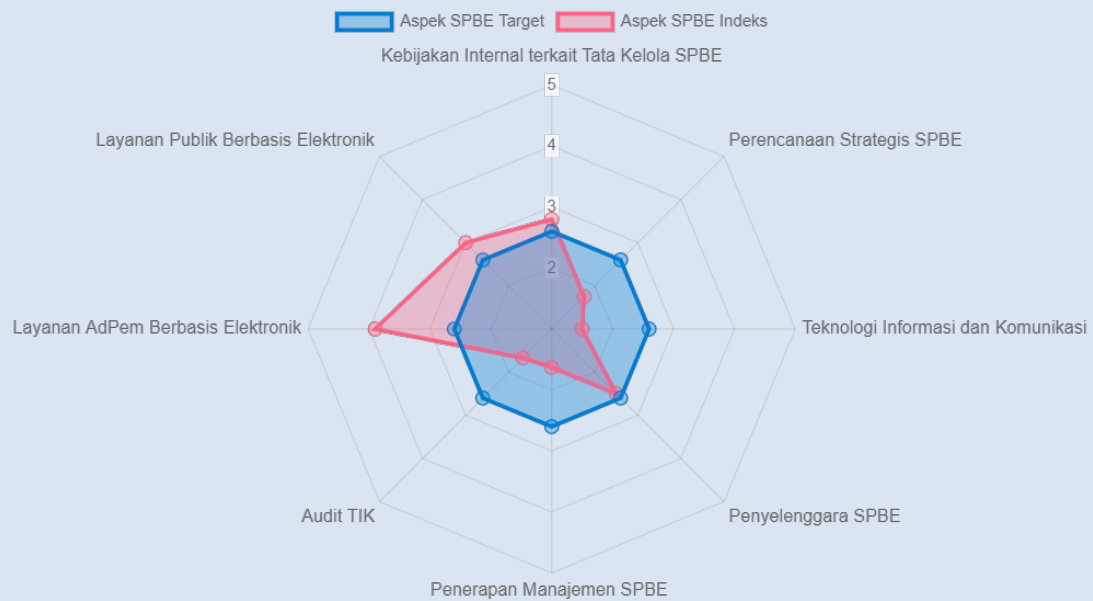
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,7
Domain Kebijakan SPBE	2,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,75
<i>Tecnologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,64
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,63
<i>Audit TIK</i>	1,67
Domain Layanan SPBE	3,54
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,90
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,00

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah dengan adanya Kebijakan Internal pada Indikator 1 - 10

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal pada Indikator 1-10 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Bengkalis no. 63 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan terkait pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai masing-masing indikator 1-10 dan di dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai masing-masing indikator 1-10
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pelaksanaan SPBE secara lebih terperinci pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai masing-masing Indikator 2 dan 4, yang mana pada Indikator 2 belum menjelaskan lengkap Peta Rencana SPBE dan Indikator 4 belum menjelaskan setiap tahap pengembangan aplikasi SPBE sesuai siklus terkait

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah ketersediaan Dokumen terkait Perencanaan Strategis SPBE (Indikator 11-14)

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat pada ketersediaan dokumen/bukti dukung masing-masing indikator 11-14.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, masing-masing dokumen/bukti dukung Indikator 11, 12, dan 14 belum disahkan atau diterapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, inovasi proses bisnis seperti dimaksud dalam Indikator 14, dokumen/bukti dukung terkait belum mencakup masing-masing versi "as-is" (versi sebelum pembaharuan) dan versi "to-be" (versi setelah pembaharuan). Selain itu, penjabaran anggaran seperti dimaksud Indikator 13 belum "mengkhususkan"/menjabarkan lebih detail ke arah dukungan implementasi SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah ketersediaan Dokumen terkait TIK (Indikator 15-18).

- **Kekuatan**
Pada Aspek TIK ini dapat terlihat adanya ketersediaan data/dokumen indikator 15-18 secara lengkap yang menunjukkan dukungan penerapan SPBE seperti dimaksud pada indikator 15-18
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki bukti dukung terkait TIK pendukung/penunjang SPBE sesuai masing-masing indikator 15-18, seperti indikator 15 yakni proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana), juga secara dokumentasi belum lengkap. Selain itu, dokumen/bukti dukung terlampir banyak yang tidak relevan sesuai dimaksud masing-masing indikator 15-18

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah ketersediaan bukti dukung terkait Penyelenggara SPBE (Indikator 19-20).

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat pada keberadaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis (melalui bukti dukung Surat Keputusan/SK Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis) untuk Indikator 19 serta pelaksanaan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan pihak/mitra lain yang mendukung penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (dibuktikan dengan dokumen Kerjasama terkait, untuk Indikator 20).
- **Kelemahan**

Namun di sisi lain, belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa seluruh tugas yang terdapat di dalam SK Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Indikator 19) serta pelaksanaan kolaborasi penyelenggaraan/implementasi SPBE belum berjalan maksimal terutama pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Indikator 20).

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah ketersediaan bukti dukung terkait Penerapan Manajemen SPBE (Indikator 21-28)

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat ketersediaan bukti/dokumen dukung Indikator 21-28 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni: Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, serta Manajemen Layanan SPBE.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, bukti dukung Indikator 21-28 banyak belum lengkap, juga bahkan bukti dukung disampaikan ada yang tidak relevan

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah ketersediaan bukti dukung terkait Audit TIK yang pernah dilaksanakan (Indikator 29-31)

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK ini dapat terlihat masing-masing pedoman Audit TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dimaksud pada Indikator 29-31
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki bukti dukung terkait Pelaksanaan Audit TIK saat ini sesuai masing-masing Indikator 29-31, di mana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait yang disampaikan (hanya pedoman Audit TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis).

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah pemanfaatan aplikasi terkait layanan SPBE (Indikator 32-41)

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menggunakan aplikasi untuk pendukung layanan SPBE, termasuk aplikasi dari pemerintah pusat (Indikator 32-41) melalui bukti dukung terkait yang ditunjukkan
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki bukti dukung terkait yang jelas/jernih dan lebih lengkap berupa tangkapan layer (screenshot) lengkap dan jelas pada penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi yang mendukung layanan SPBE, termasuk aplikasi dari pemerintah pusat (aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai) sesuai masing-masing Indikator 32-41 sehingga bukti dukung yang disampaikan dianggap masih kurang. Selain itu, bukti dukung yang disampaikan juga banyak yang kurang relevan/sesuai dengan "apa yang semestinya disampaikan" pada masing-masing Indikator 32-41

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah pemanfaatan aplikasi terkait layanan SPBE (Indikator 42-47)

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menggunakan aplikasi untuk pendukung layanan SPBE, termasuk aplikasi dari pemerintah pusat (Indikator 42-47) melalui bukti dukung terkait yang ditunjukkan (terutama layanan publik sektor yang menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat seperti OSS).
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki bukti dukung terkait yang jelas/jernih dan lebih lengkap berupa tangkapan layer (screenshot) lengkap dan jelas pada penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi yang mendukung layanan publik berbasis elektronik, termasuk aplikasi dari

pemerintah pusat (aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai) sesuai masing-masing Indikator 42-47 sehingga bukti dukung yang disampaikan dianggap masih kurang. Selain itu, bukti dukung yang disampaikan juga banyak yang kurang relevan/sesuai dengan “apa yang semestinya disampaikan” pada masing-masing Indikator 42-47

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah pada penerapan masing-masing aspek: Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Layanan Publik Berbasis Elektronik, ditunjukkan pada ketersediaan dokumen/bukti dukung terkait.

Namun disisi lain, pada masing-masing aspek: Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Layanan Publik Berbasis Elektronik, tidak semua bukti/dokumen dukung yang relevan tersedia (mayoritas bukti dukung disampaikan tidak relevan/sesuai indikator-indikator pada masing-masing aspek SPBE). Bahkan pada Aspek Audit TIK, sangat disayangkan ketidakterediaan bukti dukung terkait aspek ini pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (proses audit TIK tidak pernah terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis), hanya tersedia Pedoman Audit TIK. Selain itu, bukti dukung terkait masing-masing aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik masih belum lengkap dan blur, bahkan banyak bukti dukung disampaikan kurang relevan dengan indikator-indikator pada aspek-aspek ini.

Untuk catatan-catatan tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, termasuk saran yang disampaikan oleh asesor eksternal saat asesmen interview terutama berkaitan dengan dukungan anggaran yang secara khusus berkaitan dengan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta pendampingan untuk peningkatan masing-masing aspek yang masih kurang, yang mana pelaksanaan pendampingan tersebut perlu juga didukung oleh anggaran terkait yang memadai. Selain itu, saat asesmen periode berikutnya, sangat diperlukan untuk menyampaikan bukti dukung yang relevan dengan setiap indikator pada setiap aspek dalam asesmen SPBE sehingga memudahkan asesor dalam menilai pelaksanaan SPBE pada periode asesmen berikutnya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1